

I

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> BERITA BUANA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																											
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">(JAN)</td> <td style="text-align: center;">FEB</td> <td style="text-align: center;">MAR</td> <td style="text-align: center;">APR</td> <td style="text-align: center;">MEI</td> <td style="text-align: center;">JUN</td> <td style="text-align: center;">JUL</td> <td style="text-align: center;">AGST</td> <td style="text-align: center;">SEPT</td> <td style="text-align: center;">OKT</td> <td style="text-align: center;">NOV</td> <td style="text-align: center;">DES</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">5</td><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">7</td><td style="text-align: center;">8</td><td style="text-align: center;">9</td><td style="text-align: center;">10</td><td style="text-align: center;">11</td><td style="text-align: center;">12</td><td style="text-align: center;">13</td><td style="text-align: center;">14</td><td style="text-align: center;">15</td><td style="text-align: center;">16</td><td style="text-align: center;">17</td><td style="text-align: center;">18</td><td style="text-align: center;">19</td><td style="text-align: center;">20</td><td style="text-align: center;">21</td><td style="text-align: center;">22</td><td style="text-align: center;">23</td><td style="text-align: center;">24</td><td style="text-align: center;">25</td><td style="text-align: center;">26</td><td style="text-align: center;">27</td><td style="text-align: center;">28</td><td style="text-align: center;">29</td><td style="text-align: center;">30</td><td style="text-align: center;">31</td> </tr> </table>		(JAN)	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(JAN)	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : T.4																																												
TAHUN 2004																																												

## Pemerintah *road show* cari investor asing garap listrik

JAKARTA (Bisnis): Pemerintah dengan dukungan sejumlah lembaga keuangan internasional, dalam waktu dekat ini, akan melakukan *road show* ke Jepang, Amerika Serikat dan Eropa sebagai upaya menarik investor asing untuk berinvestasi di sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Yogo Pratomo menurukan tujuan *road show* selain untuk menarik investor dari luar negeri, pemerintah juga menawarkan kepada investor untuk meneruskan pembangunan proyek IPP (*Independent Power Producer*) yang sudah dibuka kembali tahun ini.

"Dengan dukungan World Bank, IDB dan JBIC, *road show* ini akan kami jadikan sebagai upaya pemberian informasi terbaru kepada investor asing tentang iklim investasi yang semakin kondusif di sektor ketenagalistrikan Indonesia," tuturnya kepada wartawan ketika mengikuti

sidak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di kantor PT Pertamina Perkapalan belum lama ini.

Menurut dia, pemerintah dan PT PLN akan menginformasikan lebih dalam mengenai kondisi makro ekonomi sektor ketenagalistrikan yang sekarang makin stabil.

Yogo mengatakan bahwa stabilnya kondisi makro ekonomi di kelistrikan salah satunya karena harga listrik sudah hampir mencapai tingkat keekonomiannya.

"Dengan adanya harga keekonomian ini akan merupakan salah satu jaminan keamanan bagi investor untuk menanamkan modalnya di sektor kelistrikan," katanya.

Dia mengatakan kurangnya investor di sektor ketenagalistrikan ini merupakan masalah terbesar di Indonesia.

Menurut dia, *road show* yang dilakukan ke Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa ini mendapatkan dukungan

penuh dari World Bank, Asian Development Bank (ADB) and the Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

"Ketiga lembaga keuangan internasional ini sudah mulai aktif menyediakan dana bantuan untuk penyelesaian proyek ketenagalistrikan di Indonesia, terutama dari World Bank yang sudah memberikan dorongan kepada pemerintah agar terjadi liberalisasi di sektor ini," ujarnya.

Sebelumnya, Dirut PT PLN Eddie Widiono Suwondho menuturkan PT PLN membutuhkan dana sebesar US\$5 miliar untuk investasi periode 2002-2006.

"Untuk 10 tahun ke depan maka dibutuhkan dana sebesar US\$28,5 miliar untuk menyelesaikan proyek ketenagalistrikan," tuturnya.

Yogo menambahkan di *road show* nantinya maka pemerintah akan memberikan penawaran pertama kepada manajemen IPP yang dihentikan proyeknya.

"Mereka akan mendapatkan kesempatan pertama untuk meneruskan kembali sejumlah proyek ketenagalistrikan itu. Namun pemerintah tetap membuka kesempatan kepada investor lainnya untuk berinvestasi di Indonesia," katanya.

Yogo mengatakan saat ini ada tujuh proyek IPP yang akan ditawarkan kepada investor yakni Tanjung Jati A, Tanjung Jati B, Cilacap I, Kamojang, Serang, Cilegon, dan Pasuruan.

Pembangunan pembangkit itu, sebelumnya dilakukan oleh 27 IPP yang dihentikan pada 1997 akibat krisis ekonomi. Pada Juni 2003, pemerintah mengupayakan negosiasi ulang dengan para IPP.

Yogo mengatakan pemerintah telah melakukan konstruksi ulang atas proyek pembangkit listrik Cilacap I pada akhir 2003. Pembangkit di Cilacap (600 MW) dan Cilegon (730 MW) akan didanai dari bank dari Cina. (dle)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> BERITA BUANA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
(JAN) FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : T.4	

TAHUN 2004

# Bank Cina siap danai dua PLTU US\$560 juta

JAKARTA (Bisnis): Bank dari Cina siap mendanai pembangunan pembangkit PLTU Tarahan 2x100 MW dan PLTU Peranap 2x250 MW senilai US\$560 juta.

Direktur Pengembangan dan Niaga PT Indonesia Power Djuwarno mengatakan kedua proyek itu hampir pasti mendapatkan dukungan pendanaan dari Cina, sehingga harapan untuk segera dibangun akan bisa tercapai.

"Kedua proyek ini adalah pembangkit mulut tambang yang terdapat di Sumatra bagian Selatan dan Riau. PLTU Tarahan diharapkan bisa dimulai Agustus tahun ini dan Peranap pada awal 2005," katanya kepada *Bisnis* belum lama ini.

Dia mengatakan saat ini masih berlangsung negosiasi dengan bank dari Cina itu untuk komitmen pinjaman bagi kedua proyek tersebut.

Sejauh ini, katanya, pihak bank itu secara prinsip sudah setuju memberikan pinjaman dengan perincian US\$400 juta untuk Peranap di Riau dan US\$160 juta untuk Tarahan di Lampung.

Dia mengharapkan proses negosiasi dan persiapan penyediaan dana proyek itu dapat dituntaskan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama agar bisa dilakukan langkah lebih lanjut atas proyek tersebut.

Dari sisi proyek sendiri, lanjutnya, sudah dilakukan persiapan proyek fisik PLTU dengan melakukan tender pengerjaan terhadap proyek PLTU Tarahan.

Dia menuturkan panitia lelang proyek telah menetapkan lima calon kontraktor dari sembilan kontraktor yang terseleksi.

Selanjutnya, katanya, dalam waktu dekat segera akan dipilih satu nama pemenang yang akan menjadi kontraktor dari pembangunan pembangkit tersebut.

Untuk PLTU Peranap, tambahnya, saat

## Kapasitas pembangkit milik PT Indonesia Power

Unit Pembangkit	Daya mampu per November 2003 (Mega Watt)
PLTU Suralaya	2903
PLTG/PLTGU Priok	802
PLTA Saguling	742
PLTP Kamojang	334
PLTA Mrica	293
PLTG Semarang	930
PLTG/PLTGU Perak-Grati	687
PLTG Bali	182
<b>Total Jawa-Bali</b>	<b>6.873</b>

Sumber: PT Indonesia Power

ini masih dalam tahap studi kelayakan yang diharapkan rampung Januari.

Studi itu, tambahnya, terkait dengan tingkat kelayakan proyek itu dari segi keekonomian kapasitas pembangkitnya.

"Kami belum menetapkan kapasitas pastinya sehingga proyeksinya masih pada kisaran 2x125 MW atau 2x150 MW."

Djuwarno mengatakan untuk proyek Peranap, pihaknya menginginkan porsi kepemilikan menjadi 60:40 dengan PTBA sebagai mitra kerjasama.

Dalam hal ini, tuturnya, perusahaan menginginkan status pengendali dalam proyek pembangkitannya agar lebih leluasa dalam memenej operasi pembangkit itu.

Sedangkan untuk PLTU Tarahan, katanya, status perusahaan adalah *owner* penuh terhadap proyek dengan membuat komitmen pasokan batu bara dari KP yang dimiliki PTBA di Tarahan.

Dia memperkirakan kedua proyek itu sudah bisa beroperasi dan masuk *grid* interkoneksi Sumatra pada 2007-2008.

Dengan begitu, tuturnya, maka akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi kapasitas di Sumatra yang juga tengah mengalami krisis daya. (irs)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> BERITA BUANA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> <input type="radio"/>																																											
KODE: <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>APR</th><th>MEI</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGST</th><th>SEPT</th><th>OKT</th><th>NOV</th><th>DES</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td></tr> </tbody> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 3																																												
TAHUN 2004																																												

# Investasi Listrik Rp15 Triliun untuk Bangun Pembangkit

**JAKARTA (Media):** Investasi ketenagalistrikan yang mencapai Rp15 triliun, sebagian besar digunakan untuk membangun pembangkit, transmisi dan distribusi, serta terminal LNG.

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE), Departemen ESDM Yogo Pratomo mengatakan hal tersebut menyinggung prospek investasi sektor ketenagalistrikan menyusul tidak adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada 2004.

"Sekitar Rp9 triliun investasi dilakukan PT PLN sisanya oleh perusahaan swasta dan bantuan lembaga internasional," kata Yogo di Jakarta akhir pekan lalu.

Kini Indonesia masih membutuhkan tambahan daya listrik sebesar 25.000 megawatt (MW), setidaknya dari 2003 sampai 2010 dibutuhkan investasi US\$25 miliar (Rp200 triliun). Apalagi rata-rata tingkat pertumbuhan konsumsi listrik nasional per tahun mencapai 7% hingga 10%.

Pada 2004, pertumbuhan akan mencapai 7,9% dan investasi tersebut sebagian besar diperuntukkan untuk pembangunan sejumlah pembangkit pada sistem Jawa-Madura-Bali dan luar Jawa, pembangunan jaringan transmisi dan distribusi, serta terminal gas alam cair (*liquefied natural gas/LNG*).

Menurut Yogo, investasi di sektor ketenagalistrikan di tahun mendatang masih cukup menarik bagi investor asing yang ditandai dengan dimulainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap akhir Desember 2003.

Pasalnya, pembangunan pembangkit senilai US\$600 juta itu didanai langsung oleh Bank of China melalui Chengda Engineering Corporation tanpa meminta *government guarantee*

(jaminan dari pemerintah Indonesia). Sebelumnya, dalam setiap proyek listrik swasta, investor biasanya meminta jaminan ini kepada PT PLN sebagai mitra dan konsumen produksi listrik mereka.

"Artinya, kini investor sudah mulai pada *confidence level* (tingkat kepercayaan tinggi) kepada Indonesia," jelas Yogo.

Untuk lebih meyakinkan investor, pemerintah dalam tahun ini akan melakukan peninjauan awal investasi ketenagalistrikan dengan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ke sejumlah negara di Eropa, Jepang, China, dan AS.

## Studi kelayakan

Tujuannya untuk menjelaskan iklim investasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia sudah membaik, tingkat makroekonomi mulai stabil, dan tarif listrik sudah mencapai tingkat keekonomian. Sekaligus juga dijelaskan situasi dan kondisi sosial politik menjelang Pemilu 2004.

"Justru dengan didampingi lembaga-lembaga internasional itu, investor akan merasa yakin menanamkan modalnya. Sehingga mereka tidak perlu lagi meminta *government guarantee* yang sering menghambat masuknya investasi di Indonesia," kata Dirjen LPE.

Sejumlah proyek pembangkit listrik yang akan dibangun tahun ini, yakni PLTGU Cilegon (730 MW), PLTU Batam (55 MW), PLTG Batam (30 MW), PLTG Tanjung Batu (50 MW), PLTGU Muara Tawar (140 MW), PLTU

Asam-Asam (2x55 MW), PLTU Cilacap (600 MW), PLTU Tarahan, PLTA Sipariparohas, PLTG Labuhan Angin, dan PLTGU Muara Karang dan Tanjung Priok.

Investasi pembangunan ini sebagian didanai dari anggaran PT PLN dan sisanya dari investor asing seperti Rumania, China, dan kredit ekspor dari JBIC.

Sedangkan untuk pengembangan jaringan transmisi, tahun ini PT PLN akan melanjutkan pembangunan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 kilovolt (kv) senilai Rp2 triliun di selatan Jawa. Untuk jalur Paiton-Kediri-Pedanklaten telah beroperasi 22 September 2003 dengan pembiayaan kredit ekspor BNP Paribas. Akhir tahun ini pembangunan jalur sisanya dari Klaten-Tasikmalaya-Depok-Gandul diperkirakan selesai.

Yogo yang juga komisaris PT PLN itu mengakui telah memberikan persetujuan kepada direksi untuk melakukan studi kelayakan proyek terminal untuk regasifikasi LNG di Jabar pada tahun ini.

Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PT PLN, Ali Herman Ibrahim, mengatakan kini pihaknya telah meminta perusahaan asal AS Kellogg, Brown and Root untuk melakukan studi kelayakan proyek tersebut.

Proyek ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar US\$300 juta-US\$400 juta dengan waktu pengerjaan tiga tahun.

"Proyek ini nantinya akan memanfaatkan gas LNG dari ladang Bontang, Tangguh atau Donggi untuk memasok gas bagi sejumlah pembangkit di Jawa Barat. Mengingat cadangan gas di sana sudah mulai menipis. Ini terkait dengan keamanan pasokan pembangkit listrik kita." (Wis/E-2)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> BERITA BUANA <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> <input type="radio"/>
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
(JAN) FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 8 <span style="float: right;">TAHUN 2004</span>	

# Keuntungan PLN pada Tahun Ini Diperkirakan Rp 1 Triliun

"Keuntungan PLN pada tahun ini akan digunakan untuk membayar cicilan utang."

**JAKARTA** — PT PLN (Persero) dipastikan bakal mendapatkan keuntungan usaha pada tahun ini sebesar Rp 1 triliun. Keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk membayar utang senilai Rp 28 triliun.

Anggota Dewan Komisaris PLN Yogo Pratomo mengatakan, keuntungan tersebut didasarkan atas proyeksi pendapatan perusahaan pada tahun ini lebih besar dibandingkan biaya operasional. Keuntungan sebesar Rp 1 triliun itu, kata dia, merupakan keuntungan kotor sebelum dikurangi pajak dan kewajiban lain-lain. "Laba bersihnya mencapai Rp 300 miliar," ujarnya akhir pekan lalu.

Yogo yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi menjelaskan, selain meningkatnya pendapatan, keuntungan kali ini didasarkan atas asumsi nilai tukar Rp 8.600 per US\$ 1 dan tarif listrik Rp 600 per kilowatt per jam (kWh). "Keuntungan PLN pada tahun ini

akan digunakan untuk membayar cicilan utang," ujarnya. Total utang perusahaan yang memonopoli bisnis kelistrikan di Tanah Air ini sebesar Rp 28 triliun.

Saat ini, 90 persen pendapatan terbesar PLN berasal dari penjualan tenaga listrik. Pada 2002, pendapatan dari penjualan tenaga listrik sebesar Rp 39 triliun dan meningkat menjadi Rp 52 triliun pada tahun lalu. Untuk 2004, pendapatan PLN diperkirakan akan bertambah sebesar Rp 2 triliun menjadi Rp 54 triliun.

Sebelumnya, Direktur Keuangan PLN Parno Isworo mengatakan, pada 2004 PLN akan membukukan pendapatan sebesar Rp 66,1 triliun dan beban usaha Rp 62,1 triliun dengan asumsi harga jual listrik Rp 613 per kWh. "Peningkatan pendapatan itu jika tarif listrik tidak naik," ujarnya September lalu di depan anggota Komisi Energi DPR.

Dengan kondisi keuangan tersebut, kata Parno, pada tahun ini PLN akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 3,96 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 3,4 triliun berasal dari subsidi pemerintah. Sisanya sebesar Rp 241 miliar merupakan laba perusahaan.

Menurut dia, untuk 2004, perusahaan memperkirakan biaya

pokok produksi listrik tegangan rendah sebesar Rp 744 per kWh, tegangan menengah Rp 585, dan tegangan tinggi Rp 527. Sedangkan biaya pokok pembangkitan lebih rendah dari Rp 527 per kWh. Sehingga, biaya pokok produksi listrik rata-rata mencapai Rp 664 per kWh.

Perhitungan biaya pokok produksi listrik, kata Parno, didasarkan atas beberapa asumsi, di antaranya kurs Rp 8.700 per US\$ 1, harga bahan bakar minyak jenis *high speed diesel oil* (HSD) Rp 1.800 per liter, jenis IDO Rp 1.800, dan jenis MFO Rp 1.560 per liter. Kemudian, harga beli gas alam US\$ 2,5 per *million British thermal unit* (MMBtu), harga panas bumi Rp 330 per kWh, dan harga batu bara Rp 234 per kilogram.

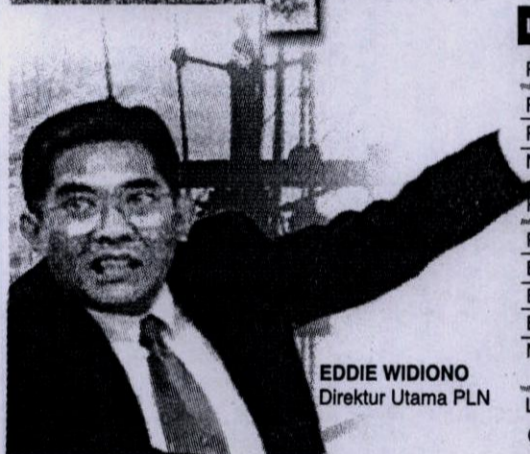
## Terminal LNG

Sementara itu, mengenai rencana PLN membangun terminal penerima gas alam cair atau *liquefied natural gas* (LNG) di Jawa Barat, menurut Yogo, komisaris telah memberikan persetujuan. Persetujuan tersebut tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2004.

Saat ini PLN sudah menunjuk konsultan dari Amerika Serikat, Kellogg, untuk melakukan studi

## PLN SUDAH UNTUNG

Lima tahun lalu ketika krisis ekonomi menghantam Indonesia, perusahaan listrik negara nyaris bangkrut. Ketika itu, biaya pengeluaran membengkak, sementara pendapatan perusahaan tidak mengalami peningkatan. Untuk menyelamatkannya, pemerintah menaikkan tarif dasar listrik setiap tahun sejak 2000. Dan kini meski tidak ada kenaikan listrik, perusahaan yang memonopoli bisnis kelistrikan di Indonesia masih bisa meraup laba sebesar Rp 1 triliun. ● ali ny/syakur



**EDDIE WIDIONO**  
Direktur Utama PLN

LAPORAN KEUANGAN	2002	2001	2000
<b>PENDAPATAN</b>			
Penjualan listrik	39	28,3	22
Pendapatan usaha lain	5,2	7,1	0,5
Nilai Pendapatan Usaha	44,2	35,4	22,5
<b>PENGELUARAN</b>			
Pembelian listrik	11,2	8,7	9,4
Biaya pembangkitan	29,4	18	13,4
Biaya pemeliharaan	3,6	2,6	1,6
Beban usaha lain	8,1	2,5	2,8
Nilai Beban Usaha	52,3	31,9	27,2
Laba/(Rugi) Usaha	(8,2)	3,4	(4,6)
(DALAM TRILIUN RUPIAH)			SUMBER: PT PLN (PERSERO)

kelayakan proyek dan akan dimulai pada Januari 2004. Direncanakan pembangunan terminal penerima LNG tersebut akan menelan biaya sebesar US\$ 300 juta.

Yogo mengatakan, persetujuan komisaris atas rencana terse-

but didasarkan atas upaya PLN untuk menekan biaya produksi. Saat ini sebagian besar pembangkit PLN menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Dengan pembangunan terminal LNG, penggunaan BBM akan diganti

dengan gas alam. "Jika bahan bakar pembangkit bisa diubah dengan gas, biaya produksi listrik menjadi lebih murah sehingga bisa mempengaruhi tarif dasar listrik," ujarnya.

● syakur usman

4

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> BERITA BUANA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
KODE: <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	TAHUN 2004
HALAMAN: 24	

# Kebijakan listrik 2004 rawan dipolitisasi

Memasuki tahun sarat politik 2004, sektor ketenagalistrikan berpotensi menjadi 'tumpangan' pemantik emosional bagi masyarakat.

Oleh Irsad

Wartawan *Bisnis Indonesia*

**S**etidaknya ada dua isu substansial yang akan menghangat yaitu konflik tarif dasar dan kemampuan suplai listrik. Kedua hal ini ditengarai akan menjadi isu yang sangat krusial dalam masa Pemilu mendatang. Sehingga partai politik—sebagai pihak penguasa maupun pihak penantang—diperkirakan akan menggunakannya sebagai bagian dari materi isu kampanye.

Kedua isu ini sangat rawan menjadi serempetan kampanye politik karena menjadi bagian dari masalah yang sensitif di tengah masyarakat. Maka, apapun kebijakan yang diambil terhadap dua masalah itu sudah pasti akan menarik dan menjadi perhatian bagi para politikus maupun masyarakat sendiri.

Terlepas dari apapun motivasi yang diusung oleh kalangan poli-

tikus dan masyarakat di pihak lain, maka masalah listrik sudah pasti menjadi titik krusial pada 2004.

Belum lagi gugatan terhadap UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan di Mahkamah Konstitusi. Dan kalau bisa dikategorikan sebagai masalah, maka sidang gugatan oleh sejumlah LSM terhadap UU No. 20/2002 juga akan menjadi masalah yang akan meramaikan suasana sektor ini pada tahun depan.

Hingga 2003, sektor ketenagalistrikan sendiri, sebenarnya menorehkan *success story*, yaitu tuntasnya renegotiasi 26 *independent power producers* (IPP) atau listrik swasta—kecuali PLTP Karaha Bodas, dan lahirnya UU No. 20/2002 itu sendiri. Keduanya bisa dianggap sebagai pencapaian prestasi tersendiri bagi sektor itu.

#### Tekanan publik

Tetapi, dua beban masalah

yang--disebutkan di awal tulisan ini--masih belum tuntas hingga 2004, berpotensi menimbulkan letupan baru di sektor tersebut.

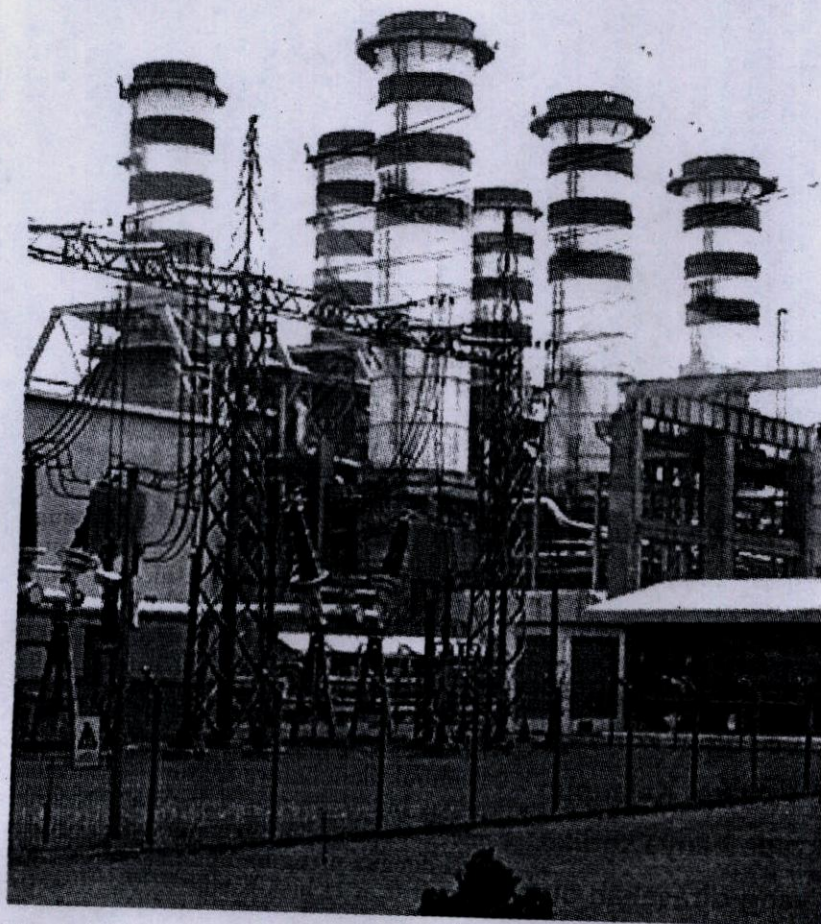
Masalahnya adalah pihak regulator maupun pemain, dalam hal ini pemerintah dan PLN, merasa tarif yang berlaku saat ini belum menunjukkan kondisi tarif pasar yang sesungguhnya.

Sedangkan di pihak lain, masyarakat merasa pula bahwa tarif yang ada sekarang sudah sangat membebani mereka. Maka, terjadi konfrontasi interpretasi dan harapan antara pemerintah dan PLN di satu pihak, dan masyarakat di pihak lain.

Klimaks dari masalah ini adalah dibatalkannya kenaikan TDL tahap IV 2003 lalu. Pembatalan kenaikan tarif tahap IV itu bisa dikatakan sebagai akibat dari tekanan publik, sehingga pemerintah dan DPR urung menaikkan tarif dasar listrik (TDL).

Tambahan kapasitas sistem Jawa Madura dan Bali (2004-2008)					
Nama proyek	PLN/IPP	Jenis	Operasi	Status	MW
Muara Tawar	PLN	PLTG	2004	Ongoing	840
Pemaron	PLN	PLTGU	2004	Ongoing	45
Pembangkit baru	PLN	PLTG	2005	Rencana	600
Cilegon	PLN	PLTGU	2005	Committed	750
Tanjung Jati B	IPP	PLTU	2006	Ongoing	1320
Cilacap	IPP	PLTU	2007	Ongoing	600
Repowering M. Karang	PLN	PLTGU	2007	Committed	720
Muara Tawar	PLN	PLTGU	2007	Committed	225
Tanjung Priok	PLN	PLTGU	2007	Rencana	720
<b>Total</b>					<b>5.820</b>

Sumber: PLN



Bisnis/Yayus Yuswoprihanto

Saat pembatalan tarif itu, posisi besaran tarif rata-rata listrik sudah mencapai Rp574 per kWh atau US\$0,0675 per kWh pada hitungan kurs Rp8.500/US\$1.

Tarif tersebut berada pada posisi sedikit di bawah *benchmark* tarif pasar nasional yang sering disebut oleh PLN dengan 'tarif keekonomian' yakni US\$0,07 per kWh.

Kalau diperhitungkan untuk kondisi 2004 maka, ada kecenderungan tarif ini akan melemah. Hal itu didasarkan pada perhitungan dengan hanya memakai asumsi nilai kurs dolar AS pada APBN 2004 yang menetapkan Rp8.600 per US\$1.

Bahkan, berdasarkan analisa sejumlah ekonom, bisa jadi nilai tukar dollar AS akan berada pada posisi Rp8.700 atau sama artinya dengan makin besarnya kemungkinan melemahnya nilai tarif terhadap acuan tarif pasar yang ditetapkan PLN.

Konsekwensi dari persoalan tarif listrik 2004 adalah masih terbukanya ruang bagi pemerintah untuk beralasan menaikkan tarif listrik tersebut. Nah, di sinilah akan terjadi konflik dengan keinginan masyarakat yang berharap tarif listrik tidak naik lagi.

Masalah tarif ini menjadi persoalan yang cukup rumit dalam kondisi perekonomian nasional yang begitu rapuh dalam soal daya beli masyarakatnya. Sementara PLN sebagai pengelola pasar listrik selalu menuntut adanya kompensasi harga yang lebih tinggi atau setidaknya mengacu pada tarif US\$0,07 per kWh.

PLN menganggap adanya keterkaitan erat antara aktivitas investasi dengan

besaran nilai jual *out put* listrik. Kasarnya, kalau harga oke, maka ketersediaan pasokan pun oke.

Akan tetapi, kalau berkaca pada kondisi 2004, maka langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah kemungkinan akan menempuh jalan damai alias menunda lagi kenaikan listrik.

Penundaan kenaikan TDL sepanjang 2004 sangat logis. Kepala pemerintahan sebagai bagian dari politik praktis tentu tidak mau membuat kebijakan yang tidak populer.

Sebab dengan tetap menaikkan TDL untuk mengejar US\$0,07 per Kwh adalah sama dengan kebijakan tidak populer. Kebijakan semacam ini dianggap sebagai kebijakan berisiko politik untuk tidak disenangi oleh konstituen politik. Sebagai peserta Pemilu, sudah jelas partai yang berkuasa tidak mau kehilangan dukungan rakyat.

Sementara dari sisi ketahanan pasokan listrik nasional, terlihat belum ada perubahan yang besar pada 2004. Terutama ketersediaan pasokan untuk listrik sistem Jawa-Bali masih akan berjalan secara konservatif, di mana jumlah tambahan kapasitas baru yang masuk belum berimbang dengan tingkat kebutuhan.

Berdasarkan data tambahan kapasitas pembangkit 2004, maka yang akan masuk a.l. PLTG Muara Tawar (PLN) sebesar 840 *Mega Watt* (MW), PLTG Pamaran 45 MW.

Perubahan angka kapasitas pembangkit secara radikal diperkirakan baru akan terjadi mulai akhir 2005, di mana sejumlah pembangkit baru akan mulai *commissioning* di *grid* Jawa, Madura dan Bali. Hal itu

disebabkan mulai masuknya sejumlah investor swasta pasca-dibukanya deregulasi baru disektor pembangkitan.

### Investasi baru

Fenomena baru yang akan terlihat pada 2004 adalah masuknya sejumlah nama investor muka baru di sektor pembangkitan. Sejak keluarnya kebijakan penghapusan monopoli di sektor pembangkitan kelihatannya sejumlah investor asing sudah mulai menjajaki sejumlah proyek pembangkitan di Indonesia.

Sebut saja beberapa perusahaan BUMN Cina yang mulai merengsek mengejar proyek investasi kelistrikan di Indonesia. Proyek yang sudah *on going* adalah PLTGU Palembang Timur dan PLTU Cilacap yang cukup tergolong besar.

Fenomena investasi asing di sektor kelistrikan di masa mendatang akan sangat terkait dengan sejauh mana konsistensi Indonesia dalam menerapkan kompetisi pasar khususnya di sektor pembangkitan secara konsisten.

Artinya, seberapa besar kemampuan pemerintah—dalam hal ini diwakili oleh PLN yang masih memegang hak pasar penjualan—memberikan margin bagi setiap investasi yang dilakukan oleh investor.

Dan mungkin yang sedang dicermati oleh calon maupun investor saat ini adalah proses gugatan UU No. 20/2002 di Mahkamah Konstitusi. Akhir dari persidangan di Mahkamah Konstitusi itu akan menjadi cerminan bagi investor dalam mengambil keputusan untuk *go ahead or not*.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> BERITA BUANA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input checked="" type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> <input type="radio"/>																								
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																								
<table border="1"> <tr> <td><b>JAN</b></td> <td>FEB</td> <td>MAR</td> <td>APR</td> <td>MEI</td> <td>JUN</td> <td>JUL</td> <td>AGST</td> <td>SEPT</td> <td>OKT</td> <td>NOV</td> <td>DES</td> </tr> <tr> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</td> <td>13 14 15 16</td> <td>17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</td> <td colspan="9"></td> </tr> </table>		<b>JAN</b>	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15 16	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31									
<b>JAN</b>	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES														
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15 16	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																							
HALAMAN : 20											TAHUN 2004														

**Tanggapan PT PLN  
untuk M. Syarif F.N.**

**MENANGGAPI** surat dari Sdr. Drs. M. Syarif F.N. di Kp. Gunung Guruh RT 10 RW 5 Cibentang Gunung Guruh Kab. Sukabumi ("PR", 2/1) berjudul "Pelayanan PT PLN Sangat Mengecewakan",

kami sampaikan permohonan maaf atas terjadinya ketidaknyamanan dalam layanan pembayaran rekening listrik. Berkenaan dengan itu, dapat kami jelaskan:

1. Terhitung Desember 2003, layanan pembayaran rekening listrik di PLN UP Cimahi Kota mengalami perubahan fisik rekening listrik menjadi dalam bentuk/format *invoice*/tagihan dan penggunaan Sistem Gelombang. Ketika pertama kali diberlakukan (Desember 2003), ternyata terjadi keterlambatan pembayaran rekening listrik. Saat ini kendala teknis tersebut dapat teratasi dan kami berharap untuk bulan-bulan selanjutnya, layanan pembayaran rekening listrik di PLN UP Cimahi Kota dapat berjalan lancar sehingga dapat memberikan kemudahan layanan bagi pelanggan.

2. Guna menghindari antrean yang panjang di loket pembayaran rekening listrik maupun keterlambatan pembayaran, sebetulnya pelanggan PLN bisa memanfaatkan layanan pembayaran rekening listrik secara *auto debet*. Artinya, setiap pembayaran rekening listrik pelanggan dapat dilaksanakan secara otomatis melalui bank tempat pelanggan PLN menjadi nasabahnya. Informasi tentang tata cara layanan *auto debet* itu da-

pat langsung ditanyakan ke Kantor Unit Pelayanan PLN Cimahi Kota maupun kantor-kantor pelayanan PLN lainnya.

3. PLN Distribusi Jabar dan Banten beserta seluruh Unit Pelayanannya senantiasa berusaha untuk memberikan perhatian terhadap upaya perbaikan dan pembenahan kondisi kantor-kantor pelayanan, termasuk loket-loket pembayaran rekening, sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada setiap pelanggan. Kendati demikian, dengan keterbatasan anggaran perusahaan yang tersedia, maka upaya perbaikan dan pembenahan bangunan kantor-loket tadi tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan, melainkan secara bertahap dengan skala prioritas.

4. Untuk meningkatkan layanan pembayaran rekening listrik, PLN Distribusi Jabar dan Banten saat ini tengah mengembangkan layanan "Praqtis", yaitu suatu bentuk layanan pembayaran rekening listrik yang bisa dilakukan dengan menggunakan layanan ATM pada 14 bank yang memberikan layanan "Praqtis" dan telah bekerja sama dengan PLN Distribusi Jabar dan Banten. Dengan cara ini, maka pembayaran rekening listrik bisa dilakukan dimana pun selama

tersedia ATM di 14 bank tadi. Secara bertahap, layanan "Praqtis" ini akan dikembangkan di seluruh Unit Pelayanan PLN Distribusi Jabar dan Banten.

Demikian penjelasan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Endro Yulianto**  
Deputy Manager Public Relations  
PT PLN (Persero) Distribusi  
Jawa Barat dan Banten

6

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> BERITA BUANA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> YMIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : T.4 <span style="float: right;">TAHUN 2004</span>	

## Kembalinya gairah investor panas bumi

Masyarakat panas bumi Indonesia meninggalkan 2003 dengan membawa pijakan penting bagi perjalanan usaha panas bumi di masa mendatang. Sehingga ada secercah harapan sektor ini akan lebih bergairah di masa depan.

Setidaknya ada momen penting yang telah berhasil diciptakan pada tahun lalu a.l. sukses renegotiasi sepuluh proyek pembangkit swasta di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)-kecuali PLTP Karaha Bodas- dan lahirnya UU tentang Panas Bumi. Kedua *success story* ini bisa dikatakan sebagai kado istimewa bagi masyarakat panas bumi di Indonesia.

Keistimewaanannya itu dari dua hal. *Pertama*, Berakhirnya masa penantian panjang dari sistem peraturan usaha panas bumi.

Sejak proyek pembangkit panas bumi pertama kali dipancarkan di Kamojang pada 24 November 1978, di mana pertama kalinya panas bumi Kamojang dimanfaatkan untuk listrik dengan memasang unit monoblok 250 KW pada sumur Kamojang-6, barulah pada 2003 bisa dibuat undang undang nya.

*Kedua*, mencairnya konflik

atau perseteruan. Pasca dihentikannya proyek listrik swasta pada 1997 maka memicu ketegangan antara pihak investor dan pemerintah cq Pertamina dan PLN. Dalam hal ini termasuk 11 proyek PLTP.

Berhasilnya negosiasi ulang dengan investor, berarti suasana di bidang pengusahaan panas bumi kembali mencair dan kondusif.

Terkecuali kasus PLTP Karaha Bodas, yang saat ini masih terus berkecamuk dengan saling adu kekuatan di tataran hukum dan politik.

Untuk kasus Karaha Bodas ini dikabarkan bahwa jumlah klaim yang harus dibayarkan ke investor makin membengkak dari US\$261 juta menjadi US\$290 juta.

### Kasus KBC

Kerugian pemerintah dalam kasus Karaha Bodas memang tidak sedikit karena US\$650 juta dananya di rekening Pertamina telah dibekukan di AS. Mungkin inilah satunya-satunya luka yang masih tersisa di sektor itu.

Hasil renegotiasi listrik swasta dan UU Panas Bumi akan berkorelasi dengan suk-



ses atau tidaknya usaha panas bumi ke depan.

Tercapainya kesepakatan dengan 10 IPP di sektor panas bumi berpeluang menimbulkan lagi kepercayaan investor.

Dari 10 IPP yang direnegosiasi itu memiliki kapasitas terpasang sebesar 1.235 Mega Watt. Jika 10 proyek ini bisa dibangun kembali dengan mendatangkan investor baru atau dengan kemampuan sendiri maka akan cukup memberikan kontribusi bagi kapasitas listrik nasional.

Lahirnya UU Panas Bumi sebagai peraturan spesifik untuk sektor tersebut akan memberi jaminan lebih pasti kepada investor untuk berusaha di sektor panas bumi.

UU itu seperti sudah menjadi impian lama bagi kalangan masyarakat panas bumi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena regulasi lama yang masih berbentuk Keppres dipandang sudah tidak memadai lagi dalam menjawab tantangan dalam usaha panas bumi yang kian berkembang dengan dinamis.

### Belum memuaskan

Keradaan UU Panas Bumi

bukan tanpa cacat. Dalam UU itu ada beberapa bagian yang belum memuaskan masyarakat investor panas bumi.

Masalahnya terkait dengan pola izin dan jangka waktu yang dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan mereka.

Tetapi setidaknya—seperti dikatakan oleh kalangan DPR—bahwa ketidakpuasan dari kalangan investor tersebut diharapkan untuk sementara waktu dapat diendapkan.

Artinya, terimalah kehadiran UU itu sebagaimana adanya sambil melihat sejauh mana keefektifannya dalam beberapa waktu ke depan. Jika dalam perjalanannya terasa memang tidak memadai maka baru kemudian dibuka lagi peluang untuk melakukan tambah sulam.

Kegairahan untuk mengembangkan panas bumi di Indonesia sebesarnya sekarang ini sudah mulai kembali terasa.

Sebut saja, keinginan Amosas Indonesia untuk mengembangkan Darajat III pada 2004 dan Pertamina yang mengandeng Mitsui untuk mengembangkan tiga lapangan panas buminya.

Kalau disebut lebih terperinci lagi maka akan ada sejumlah nama lagi yang tengah

Sumber daya dan cadangan panas bumi Indonesia

No.	Pulau	Sumber daya		Cadangan			Terpasang (MWe)
		Spekulatif (MWe)	Hipotesis (MWe)	Terduga (MWe)	Mungkin (MWe)	Terbukti (MWe)	
1.	Sumatra	5.630	2.433	5.419	15	389	2
2.	Jawa - Bali	2.450	1.591	3.076	603	1.837	785
3.	NTB-NTT	125	448	612	-	14	-
4.	Sulawesi	950	125	663	110	65	20
5.	Maluku	275	117	142	-	-	-
6.	Papua	50	-	-	-	-	-
7.	Kalimantan	50	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>9.530</b>	<b>4.714</b>	<b>9.912</b>	<b>728</b>	<b>2.305</b>	<b>807</b>

Sumber: Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral, Ket.: MWe=Mega Watts electricity

menschedule pembangunan pembangkit geothermal di Indonesia.

Dalam pengembangan panas bumi sudah ada *setting* untuk melibatkan kelompok usaha kecil dan menengah terlibat di dalamnya.

Langkah ke arah itu adalah upaya mendorong koperasi untuk mengembangkan lapangan panas bumi skala kecil yang juga banyak terdapat di berbagai wilayah di Indonesia.

Kalangan masyarakat panas bumi sudah melakukan pendekatan kepada Menteri Negara Koperasi untuk memberikan peluang dibentuknya koperasi yang secara khusus melakukan usaha pengembangan panas bumi di Indonesia.

Dengan koperasi itu diharapkan masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan pendanaan dalam membangun pembangkit panas bumi.

Sebagai salah satu sumber energi bersih lingkungan atau rendah buang gas rumah kaca, pengembangan listrik panas bumi sangat didukung oleh berbagai pihak. Sektor ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara maksimal dalam menyelamatkan bumi dari ketidakstabilan iklim.

Mungkin dari segi kontribusi kuantitas kapasitas terhadap listrik nasional tidaklah sebesar pembangkit gas dan batu bara.

Tetapi keberadaannya lebih sejalan dengan keinginan untuk melestarikan bumi dari kerusakan atau dikenal dengan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

• Irsad

7